

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kecurangan dalam laporan keuangan di antara perusahaan publik telah meningkatkan perhatian berbagai pihak seperti investor, auditor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan keuangan yang seharusnya memiliki integritas dan menjadi sumber informasi yang valid untuk dasar pengambilan keputusan terkadang disalahgunakan oleh pihak yang berkepentingan. Setiap perusahaan pada dasarnya menghendaki laporan keuangan yang diterbitkannya menggambarkan kondisi perusahaan dalam keadaan terbaik. Hal ini yang kerap memicu perusahaan untuk melakukan tindak kecurangan atau memanipulasi laporan keuangan mereka agar terlihat baik bagi *stakeholder*.

Kecurangan laporan keuangan adalah usaha yang disengaja oleh perusahaan-perusahaan untuk menipu atau menyesatkan pengguna laporan keuangan yang dipublikasikan, terutama investor dan kreditur, dengan mempersiapkan dan menyebarkan laporan keuangan yang salah saji. Kecurangan pada laporan keuangan melibatkan eksekutif puncak dan auditor dengan seperangkat skema terencana yang baik dan permainan yang cukup bagus (Rezaee, 2002).

Fenomena skandal keuangan di Indonesia juga merusak kepercayaan antara manajemen dengan investor. Di awal tahun 2002, publik dikejutkan dengan adanya kasus kecurangan oleh PT Kimia Farma Tbk.

Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (*restated*), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar (Parsaoran, 2009). Berdasarkan artikel yang peneliti baca, pada laporan keuangan yang baru, PT Kimia Farma Tbk melaporkan keuntungan sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa *overstated* penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa *overstated* persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa *overstated* persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan *overstated* penjualan sebesar Rp 10,7 miliar.

Selain itu juga terdapat kasus kecurangan yang dilakukan PT Akasha Wira International Tbk pada tahun 2004, dimana pihak manajemen baru PT Akasha Wira International Tbk menemukan inkonsistensi pencatatan atas penjualan periode 2001-2004 yang dilakukan oleh manajemen lama (Detikcom, 2004). Hasil penelusuran menunjukkan untuk setiap kuartal angka penjualan lebih tinggi antara 0,6-3,9 juta galon dibandingkan angka produksi. Akibatnya, laporan keuangan yang disajikan PT Akasha Wira

International Tbk pada tahun 2001 dan 2004 lebih tinggi dari yang seharusnya dilaporkan (*overstated*). Kasus serupa juga ditemukan pada PT Great River International Tbk. Berdasarkan pemeriksaan kasus yang dilakukan oleh Bapepam pada tahun 2005 terdapat temuan terjadinya perlakuan *overstatement* atas penyajian akun penjualan dan piutang dalam laporan keuangan PT Great River International Tbk per 31 Desember 2003.

Kecurangan laporan keuangan sering dikaitkan terhadap tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan yang lemah cenderung menjadi penyebab terjadinya kecurangan laporan keuangan dalam perusahaan. Pernyataan itu dibuktikan dengan penelitian Dechow *et al.* (1996) yang menjelaskan bahwa insiden *fraud* tertinggi di antara perusahaan dikaitkan dengan sistem tata kelola perusahaan yang lemah dan rendahnya pengawasan dari manajemen. Lebih lanjut, Dechow *et al.* (1996) menemukan bahwa perusahaan yang terlibat *fraud* lebih cenderung memiliki dewan yang didominasi oleh orang dalam dan tidak memiliki komite audit. Temuan Dechow *et al.* (1996) diperkuat kembali oleh Dunn (2004) yang menyimpulkan bahwa kecurangan lebih mungkin terjadi ketika ada konsentrasi kekuasaan di tangan orang dalam (Skousen *et al.*, 2009).

Melihat fenomena yang telah terjadi, penelitian mengenai kecurangan laporan keuangan terkait mekanisme *corporate governance* masih menjadi sebuah topik yang menarik untuk diteliti. Beberapa penelitian

oleh Yang *et al.* (2017), Xu *et al.* (2017), Syamsudin (2017) dan Tan *et al.* (2015) masih meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian terdahulu menemukan kemungkinan kecurangan laporan keuangan lebih sering terjadi di perusahaan yang memiliki mekanisme *corporate governance* dan *internal control* yang lemah.

Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai suatu proses mengelola, mengarahkan, dan memantau bisnis perusahaan untuk menciptakan nilai pemegang saham dan melindungi kepentingan *stakeholders* seperti kreditur, pemasok, pemerintah, dan masyarakat (Rezaee, 2002). Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*, *Corporate Governance* adalah serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dengan demikian, tata kelola perusahaan dipandang sebagai mekanisme pemantauan tindakan, kebijakan, dan keputusan perusahaan untuk melindungi kepentingan *stakeholders*.

Struktur tata kelola perusahaan terdiri dari mekanisme internal dan eksternal untuk mengelola dan memantau kegiatan perusahaan yang bertujuan meningkatkan nilai pemegang saham. Tata kelola perusahaan dipandang sebagai interaksi di antara para partisipan pada fungsi pengawasan (dewan direksi dan komite audit), fungsi manajerial, fungsi audit (auditor internal), fungsi asurans (auditor eksternal), fungsi

kepatuhan (SEC, pembuat standar, regulator, bursa efek terorganisasi), fungsi penasehat (penasihat hukum, penasihat keuangan), fungsi pengawasan (investor, kreditur, analis, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam sistem tata kelola perusahaan (Rezaee, 2004).

Menurut KPMG (2016) terjadinya *fraud* di perusahaan dikarenakan beberapa hal yaitu: dewan komisaris dan komite audit yang tidak independen, kualifikasi anggota yang tidak tepat, ketidaktahuan auditor, regulator dan analis akan “*red sign*”, anggota komite audit memiliki keahlian yang kurang di bidang akuntansi, pihak manajemen yang sengaja merusak peranan tata kelola perusahaan, dan dominasi CEO bersama dengan anggota keluarga untuk memperkaya dirinya sendiri.

Beberapa penelitian terdahulu seperti Beasley (2000) menemukan bahwa perusahaan yang mengalami *fraud* cenderung memiliki anggota komite audit yang lebih sedikit, frekuensi rapat komite audit yang minim, dan komite audit yang tidak independen. Penelitian Persons (2005) menemukan hasil yang serupa yaitu perusahaan yang terlibat dalam kecurangan laporan keuangan cenderung memiliki anggota komite audit independen dengan jabatan yang lebih pendek, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan anggota komite audit independen untuk meneliti manajemen puncak karena kurangnya senioritas di jajaran dewan. Selain itu perusahaan yang terlibat *fraud* cenderung jarang memiliki komite audit yang hanya terdiri dari direktur independen, jajaran direksi lebih menyukai anggota komite audit yang memiliki jabatan ganda

di perusahaan lain. Hal ini sependapat dengan penelitian Zainal (2014) mengemukakan ketika mayoritas anggota komite audit bersifat independen dan memiliki keahlian akuntansi atau audit akan mengurangi indikasi adanya kecurangan laporan keuangan.

Namun bertentangan dengan penelitian Yang *et al.* (2017) yang menyimpulkan bahwa komite audit tidak berperan penting dalam mengawasi indikasi kecurangan laporan keuangan yang terjadi di Tiongkok. Melihat sudah banyaknya penelitian sejenis ini dilakukan di luar negeri tetapi sayangnya masih jarang diteliti di Indonesia. Maka penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan di Indonesia terutama pada sektor manufaktur.

Selanjutnya, hingga saat ini penelitian terkait pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan masih selalu mencantumkan dewan komisaris independen untuk diteliti hubungannya terkait indikasi kecurangan laporan keuangan. Ini berarti dewan komisaris memiliki peranan penting dalam pelaksanaan tata kelola di perusahaan untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan. Sebab dewan komisaris independen dapat memberikan keputusan yang tepat untuk mengendalikan dan memantau aktivitas manajemen puncak.

Diawali dengan penelitian Dechow *et al.* (1996), terjadinya *fraud* disebabkan oleh tingginya proporsi *insider* pada jajaran dewan komisaris. Pada sisi yang sama, Beasley (2000) menyatakan persentase dewan

dengan mayoritas direksi dari luar jauh lebih rendah untuk perusahaan yang terlibat kecurangan daripada yang tidak. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan G.Chen *et al.* (2006) yang mengatakan perusahaan yang memiliki proporsi direktur non-eksekutif lebih besar akan lebih sedikit melakukan *fraud*. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, bahwa semakin tinggi proporsi direktur non-eksekutif maka mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan laporan keuangan. Persentase dewan direksi dari luar akan meningkatkan pengawasan (Uzun *et al.*, 2004). Jajaran dewan direksi yang berasal dari luar memang cenderung lebih independen, karena tidak memiliki kepentingan pribadi di perusahaan. Dengan keterlibatan dewan komisaris independen dan komite audit independen, peran besar pemegang saham dalam mengendalikan kecurangan menjadi berkurang (Yang *et al.*, 2017).

Akan tetapi, hal ini bertolak belakang dengan penelitian Persons (2005) menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak bisa mendeteksi adanya *fraud*. Menurutnya kehadiran auditor internal lebih penting dalam mengurangi kemungkinan kecurangan. Jadi dewan komisaris independen tidak berpengaruh dalam mengatasi *fraud* di perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menguji kembali pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan.

Kepemilikan manajerial juga termasuk ke dalam mekanisme internal *corporate governance*. Kepemilikan manajerial merupakan ukuran dari

adanya pemegang saham dalam pihak manajemen di sebuah perusahaan. Pemegang saham orang dalam memiliki motivasi yang lebih besar untuk memantau manajemen. Biaya yang terkait dengan pemantauan manajemen lebih kecil dari manfaat yang diharapkan melalui kepemilikan manajerial di perusahaan (Rahnamay dan Nabavi, 2010).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Chen *et al.* (2006) menyatakan bahwa struktur kepemilikan memiliki sedikit dampak terhadap *fraud*. Beberapa penelitian terdahulu baik di Indonesia maupun di luar negeri masih sedikit meneliti pengaruh kepemilikan manajerial terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan. Maka dari itu, pada penelitian ini saya akan menyertakan variabel kepemilikan manajerial untuk diteliti pengaruhnya terkait indikasi kecurangan laporan keuangan.

Dari hasil penelitian terdahulu terdapat hasil yang inkonsisten dalam hubungan mekanisme *corporate governance* dengan indikasi kecurangan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena adanya perspektif yang berbeda mengenai *corporate governance* di setiap perusahaan. Alasan inilah yang akan menjadi dasar dalam penelitian ini. Proksi tata kelola perusahaan yang akan digunakan dalam penelitian ini kualitas komite audit, proporsi dewan komisaris independen, serta kepemilikan manajerial.

Oleh sebab itu, peneliti ingin mengkonfirmasi kembali dan meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian

tersebut peneliti memberi judul “**PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP INDIKASI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN**”.

B. Perumusan Masalah

Hasil penelitian yang tidak konsisten dalam hubungan mekanisme *corporate governance* dengan kecurangan laporan keuangan mendorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* yaitu: kualitas komite audit, proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial terhadap kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah kualitas komite audit berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh kualitas komite audit terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan.
2. Menguji pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan.

3. Menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat tersebut antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan dapat menjadi bahan literatur untuk menambah wawasan dalam bidang studi akuntansi yang membahas mengenai mekanisme *corporate governance* dan indikasi terjadinya kecurangan laporan keuangan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan agar lebih memahami mekanisme *corporate governance* serta mewujudkan *good corporate governance* untuk mencegah dan menghalangi kecurangan laporan keuangan.